

BAB V
PENGARUH ISLAM DALAM KEBIJAKAN POLITIK
SINGAPURA

Sebagai negara yang baru saja merdeka, dengan sumber daya alam yang sangat sedikit, maka Singapura mengandalkan hubungan luar negerinya sebagai sarana menjaga kelangsungan hidup. Secara geopolitik Singapura hanya memiliki sekitar 719 km² (sedikit lebih besar dari DKI Jakarta 661 km²) serta minus sumber daya alam, serta padatnya penduduk, maka pemenuhan kebutuhan hidup memaksanya untuk mendatangkan dari negara lain. Karena itulah, maka tema politik luar negeri yang menyeruak dan mendominasi kajian tentang Singapura menjadi hal yang lumrah dan tidak terlalu mengejutkan.(Wilairat:1974)

Pada Bab kelima ini akan dibahas kaitan antara politik luar negeri Singapura dengan eksistensi Islam. Islam, seperti telah dikemukakan di depan dapat meliputi komunitas Muslim Melayu yang ada di Singapura, maupun komunitas Islam yang ada di luar Singapura yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Indonesia dan Malaysia. Di bagian awal akan dibahas tentang kaitan antara politik luar negeri dan politik dalam negeri untuk mencari hubungan relasional antar keduanya. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang kaitan antara Islam dengan politik luar negeri Singapura, akan dipaparkan sebuah pengalaman empiris bagaimana peran Islam dalam politik suatu negara, dalam hal ini pengalaman Indonesia.

Bagian berikutnya akan memaparkan tentang kebijakan luar negeri Singapura terhadap Malaysia. Malaysia dikenal sebagai negara dengan kedekatan hubungan khusus, mengingat Singapura adalah pecahan Federasi Malaysia. Politik Luar negeri Singapura pertama kali pasti diarahkan untuk memastikan pola hubungannya dengan Malaysia. Di sini dapat digambarkan bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Malaysia dalam mendukung eksistensi Muslim Melayu di Singapura sehingga Singapura harus melakukan sejumlah akomodasi atas kepentingan Malaysia.

Senada dengan bagian sebelumnya, paparan khusus tentang hubungan antara Singapura dan Indonesia juga perlu dikemukakan mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas Muslim yang berbatasan langsung dengan Singapura. Sejalan dengan sikap Malaysia, pengalaman Singapura berhubungan dengan Indonesia juga diwarnai oleh hubungan konfliktual. Berawal dari politik konfrontatifnya Indonesia, Singapura juga dihadapkan ada pilihan pilihan yang sulit. Mengingat besarnya tekanan, bahkan juga ancaman, Singapura juga melakukan politik akomodatif atas keinginan Indonesia khususnya ketika keduanya ingin memperbaiki hubungan.

Bagian terakhir dari bab ini akan menganalisa bagaimana kebijakan internal Singapura untuk “menjamin” eksistensi Islam. Tekanan demi tekanan yang diberikan oleh Indonesia maupun Singapura telah membentuk citra atau *image* para pemimpin Singapura tentang Islam. Analisa menunjukkan bahwa situasi politik di Asia Tenggara khususnya yang melingkupi Singapura sangat diwarnai oleh kekuatan Islam dalam berbagai manifestasinya. Para

pemimpin Singapura terkesan memandang Islam sebagai sebuah ancaman yang sulit dihindarkan, sehingga kebijakan kebijakan yang akomodatif terhadap kepentingan Islam harus dilakukan, di antaranya adalah menjamin eksistensi Islam di Singapura.

5.1 *Linkage* antara Politik Luar Negeri dan Politik Dalam Negeri

Telah menjadi pemahaman umum bahwa politik luar negeri merupakan kelanjutan dari politik dalam negeri. Politik luar negeri juga diartikan sebagai fungsi dari politik dalam negeri. Ia diamanati untuk mencukupi kepentingan nasionalnya yang tidak bisa diraih di dalam negeri. Sebaliknya, dalam sebuah sistem internasional yang kompleks, politik dalam negeri juga akan terkait dengan politik internasional. Situasi politik internasional sangat mungkin berpengaruh pada politik domestiknya.

Model paling umum yang mampu menjelaskan kaitan antara politik luar negeri dan politik dalam negeri adalah model dari William D. Coplin. Ia menggambarkan bahwa politik luar negeri sangat ditentukan oleh para pembuat keputusan. Namun para pembuat keputusan ini juga harus melihat pada realitas tentang tiga hal yakni situasi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional (Coplin: 1992).

Pertama adalah politik domestik yakni segenap proses internal di mana di dalamnya terdapat banyak faktor berpengaruh di dalamnya. Hass menyebutkan bahwa *foreign policy begin at home*. Artinya bahwa, setiap keputusan luar negeri yang diambil oleh suatu negara adalah refleksi dari

situasi yang terjadi di dalam negerinya. Dengan demikian, politik luar negeri adalah kelanjutan dari politik dalam negeri yang ditujukan kepada pihak luar. Politik luar negeri dengan demikian juga dapat dipahami sebagai fungsi dari politik dalam negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara juga ditentukan oleh konteks internasional, yakni situasional yang terjadi dan yang diprediksi kemungkinan akan terjadi. Contoh menarik dalam hal ini misalnya dalam kurun waktu Perang Dingin, setiap negara yang akan mengambil sikap tentang situasi internasional akan selalu dihadapkan pada sistem internasional yang sedang berlangsung. Negara tersebut harus melihat ke arah mana kebijakan pemimpin blok atau sekutunya. Termasuk di dalam sistem internasional ini adalah situasional negara tetangga terdekat. Negara tetangga adalah halaman muka bagi sebuah negara, di mana ia menjalin hubungan yang paling intens. Oleh karenanya, negara tetangga biasanya akan menjadi perhatian utama.

Kaitan antara politik luar negeri dengan politik domestik akan semakin erat apabila terdapat benih konflik antara dua negara. Dalam kasus ini terdapat kaitan erat antara kebijakan luar negeri Singapura yang menyangkut negara tetangga, terutama dengan Malaysia dan Indonesia, mengingat mayoritas etnis Malaysia dan Indonesia adalah Melayu, sementara Melayu menjadi kelompok minoritas di Singapura. Mengingat faktor sejarah yang hubungan Singapura dan tetangganya yang menyimpan benih terkait masalah etnis, maka Singapura akan memberikan perhatian penuh terhadap masalah etnis ini. Dalam kaitan ini dapat dipahami bahwa perlakuan Singapura terhadap kelompok minoritas Muslim

Melayu dipengaruhi oleh kebijakan atau sikap dari Malaysia maupun Indonesia. Konflik-konflik komunal yang melibatkan etnis Melayu mudah menyulut reaksi negatif dari Malaysia maupun Indonesia terhadap Singapura.

5.2 Pengalaman Indonesia

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam kurang lebih 85% pada masa awal kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam melawan pemerintah kolonial Belanda, sebagian besar dipelopori oleh gerakan yang berbasis pada kepemimpinan ulama atau pemimpin agama, sebagaimana sejarah Indonesia sangat diwarnai oleh eksistensi kerajaan Islam. Di era Pemerintahan Belanda, kerajaan Islam inilah yang kemudian memelopori perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanudin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar dll.

Perdebatan juga sangat seru ketika merumuskan dasar negara Pancasila. Piagam Jakarta yang merupakan draf awal dari dasar negara sebenarnya telah mencantumkan kata Islam pada sila pertama. Draft awal ini berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluknya”. Artinya, bahwa sesungguhnya secara mendasar dan substansial, Indonesia adalah negara yang berbasis Islam, atau setidaknya didominasi oleh kelompok Islam baik secara kuantitas maupun peran dalam pendirian bangsa ini.

Akan tetapi ketika muncul keberatan dari kelompok minoritas non Muslim, perdebatan kian seru. Tujuh kata, yakni frase “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” ini menjadi perdebatan sentral antar

kelompok pada waktu itu, Dengan berbagai argumen yang diajukan oleh kelompok non Islam, akhirnya kelompok Islam pun mengalah dengan menanggalkan tujuh kata tersebut. Dengan demikian kata Islam hilang dari dasar negara, hilang pula dari dalam konstitusi 1945.

Dalam konstitusi yang dikenal sebagai Undang Undang Dasar 1945 tersebut, kata Islam, atau etnis yang lain, misalnya Jawa tidak sedikit pun disebutkan. Sebaliknya keragaman menjadi ciri khas dari kebangsaan Indonesia yang diikat dalam panji Bhineka Tunggal Ika, berbeda beda tetapi satu. Islam juga bukan menjadi satu satunya agama yang diakui. Pasal 29 UUD 1945 memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama yang mereka yakini kebenarannya.

Hilangnya kata Islam ini berakibat cukup panjang, karena dalam berbagai produk hukum, Islam memang tidak muncul sebagai sebuah penciri bahwa ada eksistensi dan dominasi Islam dalam dinamika politik di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah ketika Indonesia merumuskan garis kebijaksanaan luar negerinya. Studi mendalam tentang kaitan antara Islam dengan Politik Luar negeri yang dilakukan oleh Rizal Sukma, menegaskan penegasan Islam di dalamnya. Sukma telah melakukan studi atas kinerja politik luar negeri Indonesia di bawah kekuasaan Soekarno, Soeharto maupun Megawati di mana tak pernah muncul statement tentang Islam dalam politik luar negeri.

Posisi Islam pada periode parlementer tidak diungkapkan dalam istilah Bahasa islam, maupun dipakai untuk agenda keislaman, bahkan saat pemerintah dipimpin oleh pemimpin islam dari partai islam terbesar yakni Masyumi. Di luar usaha republik berusaha untuk

mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya, Islam sama sekali tidak diikutsertakan dalam agenda kebijakan luar negeri Indonesia. Bahkan posisi Islam tidak disebutkan dalam kebijakan luar negeri oleh partai, Partai Masyumi hanya meminta Indonesia secepatnya menerima tawaran Amerika Serikat terkait keanggotaan perserikatan bangsa-bangsa, memperbaiki kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dan menetapkan perwakilan yang terampil dan mampu serta dapat menguatkan kemampuan dalam memelihara perdamaian dunia

Pada tahun Mei 1951 Kabinet Sukiman yang berasal dari Partai Masyumi menegaskan bahwa Kebijakan Luar Negeri Indonesia bersumber pada Pancasila, pandangan hidup bangsa untuk perdamaian dunia. Saat pemerintahan Sukiman diwajibkan untuk memilih antara blok Amerika Serikat atau Uni Soviet, Sukiman mengatakan bahwa *“dibanding harus terlibat dalam tensi (yang melibatkan kedua negara tersebut), pemerintahan akan secara aktif menurunkan tensi tersebut”*. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah menggambarkan kebijakan luar negeri sebagai respons dari kekhawatiran internasional terkait Perang Dingin

Perhatian domestik dan pragmatisme semacam itu terbukti dalam kebijakan luar negeri pemerintah berturut-turut selama periode demokrasi parlementer. Setiap pemerintah lebih disibukkan dengan kelangsungan hidup di dalam negeri daripada mengejar drama agenda luar negeri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Natsir dan Sukiman mendefinisikan kebijakan luar negeri yang merasakan keprihatinan universal atas munculnya perang dingin di satu sisi dan keharusan mengutamakan kepentingan domestik di

sisi lain. Di sisi lain, dibanding mempromosikan etik islam tertentu yang mendefinisikan dunia dalam hal pembagian antara orang islam dan orang yang tidak percaya (kafir), Natsir dan Sukiman melihat dunia dalam hal persaingan ideologis antara liberalisme yang dipimpin Amerika Serikat dan komunisme yang dipimpin Uni Soviet.

Selama periode parlementer, isu kebijakan luar negeri berpusat pada pertengkar dalam negeri yang intens, bukan dengan istilah ideologis, melainkan lebih sebagai manifestasi persaingan atas kekuatan politik. Hal yang lebih penting adalah kelanjutan kebijakan luar negeri yang didasari dari oleh kondisi dalam negeri yang menjadi prioritas utama terkait pemulihan pembentukan Irian Barat. Permasalahan Irian Barat menjadi masalah yang tetap tidak terselesaikan Antara Indonesia dan Belanda sejak transisi kedaulatan pada Desember 1949. Kedua Negara tersebut telah menyetujui bahwa setelah satu tahun masa transisi masalah ini akan terselesaikan melalui jalur negosiasi. Namun, dengan posisi Belanda yang menjadi tidak kooperatif dan kaku, permasalahan Irian Barat menjadi permasalahan dalam negeri yang penting. Kepemimpinan oleh Partai Masyumi yang disebut sebagai “Pro Barat”, sebenarnya kebijakan luar negeri Indonesia pada awal 1950 mengambil langkah pragmatis, di mana komentar tentang politik global diungkapkan halus dan tidak mengandung nada anti-barat.

Masalah formasi identitas negara ditandai oleh perjuangan untuk menemukan keseimbangan antara realitas pluralisme di satu sisi dan islam sebagai agama mayoritas di sisi lain. tidak menghalangi kepentingan domestik tersebut. Memang perdebatan antara dua kelompok besar, kebangsaan

dan Islam, sebelumnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945 tidak memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana kebijakan luar negeri harus dilakukan.

Pemerintahan Orde Baru Soeharto meninggalkan kebijakan Soekarno terkait petualangan internasional dan mengembalikan fungsi tradisional politik luar negeri untuk memajukan kepentingan dalam negeri yang didefinisikan dalam bentuk stabilitas dan pembangunan ekonomi. Islam dipandang lebih luas sebagai tantangan yang potensial, pemerintah Orde Baru sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan kebijakan luar negeri didikte oleh pertimbangan islami. Begitu pemerintahan Orde Baru yang baru dibentuk, namun hubungan pemerintah dengan Islam mulai berubah menjadi buruk. kebijakan luar negeri Indonesia selama periode baru tersebut mencerminkan perubahan signifikan di dalam negeri. Koalisi yang membawa militer ke tampuk kekuasaan dapat digambarkan sebagai "*impossible coalition*", karena melibatkan kekuatan sosial dengan sudut pandang ideologis yang berbeda.

Amien Rais merupakan Mantan Ketua Organisasi muslim terbesar kedua Muhammadiyah, berpendapat bahwa penting bagi pemerintah untuk memiliki sikap yang jelas mengenai di mana Indonesia berada dalam sistem internasional. Dalam salah satu tulisannya Ia mengemukakan bahwa, "Indonesia telah ambigu dalam mengidentifikasi dirinya sendiri, meskipun Indonesia diakui sebagai negara muslim terbesar oleh dunia luar, pemerintah cenderung untuk mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang lebih dekat dengan Pasifik". Rais juga menuduh bahwa alasan di balik kecenderungan pemerintah untuk mengidentifikasi Indonesia

dengan Pasifik adalah karena justru beberapa pemimpin dan intelektual Indonesia tidak menyukai kenyataan bahwa Indonesia untuk dikenal sebagai dengan dunia Islam. Riza Shihbudi, pakar terkemuka terkait isu Timur Tengah, misalnya, berpendapat bahwa Negara Arab merupakan negara paling awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia, namun dalam perkembangannya, Jakarta tampaknya lebih 'intim' dengan Barat.

5.3 Politik Luar Negeri Singapura terhadap Malaysia

Malaysia adalah negara terpenting dalam hubungan luar negeri Singapura, mengingat sejarah kelahiran Singapura adalah separasi dari Malaysia. Malaysia adalah negara yang secara geografis terdekat dengan Singapura yang hanya dibatasi oleh Selat Johor yang sempit, sehingga dapat dibangun jembatan. Terdapat dua buah jembatan yang menghubungkan kedua negara, yakni jembatan yang menghubungkan area Woodland Singapura dengan Tanjung Puteri Malaysia di tengah, dan di sebelah Barat terdapat jembatan yang menghubungkan Tanjung Pelepas dengan area gelang Patah di Malaysia. Jembatan sebagai salah satu sarana jalan darat ini telah dijejali oleh penduduk dari kedua negara untuk saling melintas dengan berbagai kepentingan. Dalam ranah hubungan antarmasyarakat (non negara) kedua negara ini sangat dekat mengingat banyak warga Malaysia yang bekerja di Singapura demikian juga sebaliknya. Tidak heran jika di *Chekpoin* Woodland terdapat antrian panjang di imigrasi bagi warga kedua belah pihak yang akan masuk dan keluar negaranya.

Meskipun demikian, kedekatan ini bukan merupakan jaminan bahwa dalam ranah hubungan antarpemerintah menjadi dekat. Sebaliknya, terdapat beberapa masalah di antara keduanya. Sub bab ini akan menjelaskan kebijakan luar negeri Singapura terhadap Malaysia khususnya mengenai kebijakan luar negeri dalam aras sejarah, masalah air dan hubungan ekonomi antara keduanya.

Fase paling menentukan dalam sejarah Singapura justru terjadi pada masa awal pembentukan negara ini. Singapura mulai dikenal dalam dunia internasional khususnya setelah Stamford Raffles dari British East India Company pada tahun 1819 mendirikan pos perdagangan di kota ini. Beberapa tahun kemudian bersama dengan Penang dan Malaka, Singapura menjadi koloni dari Inggris. Ketika mulai ramai inilah, maka para pendatang dari Cina maupun India mulai berdatangan. Fase berikutnya, Singapura kian ramai setelah pembukaan terusan Suez tahun 1869. Untuk pengamanan ini, Inggris membangun pangkalan armada laut di Singapura untuk mengontrol situasi di Asia Tenggara.

Ketika terjadi Perang Dunia II, Singapura termasuk daerah yang dibom oleh Jepang, yang menyebabkannya jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942 dan diberi nama baru Syonan. Namun setelah Jepang menyerah pada Sekutu, Singapura kembali dalam penguasaan Armada Laut Inggris.

Setelah Perang Dunia berakhir, saat saat yang penting bagi Singapura dimulai. 1946 Singapura dijadikan *crown colony* yang terpisah dari Penang dan Malaka. Tahun 1959 untuk pertama kalinya Singapura mendapatkan status khusus untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dengan Perdana menteri Lee Kuan Yew. Tantangan kemudian muncul ketika

Malaysia Merdeka pada tahun 1965 dan Tunku Abdul Rahman mengajukan proposal penggabungan Singapura ke dalam federasi Malaysia yang meliputi Penang Malaka Sabah Serawak Singapura dan Brunei.

Periode awal ini ditandai oleh dua momen penting yakni negosiasi antara bergabung dan berpisah dan kedua adalah persoalan kerusuhan rasial. Dalam perjalanan Singapura bergabung dengan Malaysia sebenarnya ada keengganan dari Lee Kuan Yew, sebagaimana pengakuannya di kemudian hari. Namun pilihan bergabung sebenarnya logis mengingat Singapura tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses negosiasi berlangsung lama dengan berbagai dinamika ketidakpastian. Termasuk di antaranya adalah pengaruh dari kerusuhan rasial yang melanda negeri itu beberapa kali.

Pasca kemerdekaan Singapura 8 Agustus 1965, adalah awal tersulit bagi Singapura. Minimnya sumber daya alam serta luar geografis yang sangat sempit memaksa Singapura untuk bekerja keras agar mampu bertahan melangsungkan kehidupannya. Inilah periode di mana Singapura berada pada tahap *survival*.

Lee Kuan Yew sadar betul dengan posisi Singapura yang sangat rentan (*vulnerable*). Oleh karenanya, gagasan Lee Kuan Yew untuk mendongkrak Singapura melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi pilihan yang rasional. Kemampuan SDM menjadi prioritas ke dalam, sementara itu untuk program keluar, Singapura segera menjalin kerjasama dengan banyak negara, termasuk memperbaiki hubungan dengan dua negara tetangga, Malaysia dan Indonesia.

Dalam perspektif sejarah, Malaysia adalah negara terpenting bagi Singapura. Kedua negara tersebut awalnya adalah bagian dari koloni Inggris. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, Singapura memisahkan diri dari sistem '*crown colonial*' untuk mempunyai administrasi secara khusus pada tahun 1946. Malaysia mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 1961, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman mengajukan usulan pembentukan persekutuan Melayu yang meliputi wilayah Malaya, Sabah, Serawak, Singapura dan Brunei disetujui untuk didirikan pada 3 Agustus 1963. Namun karena protes keras yang dilancarkan oleh Presiden Soekarno, maka pembentukannya baru terealisasi pada 16 September 1963 (Singh: 2012, 24).

Partai Tindakan Rakyat (PAP) yang didirikan oleh Lee Kuan Yew memenangkan pemilihan di Singapura, mengalahkan dua partai besar di Malaya yakni UMNO dan Barisan Sosialis. Perselisihan antara Singapura dan pemerintah Federal Malaysia mulai mengemuka. Perdebatan dengan masing-masing perspektif mulai dilontarkan. Pada satu sisi Tunku Abdul Rahman mengatakan bahwa Lee Kuan Yew mempunyai ambisi untuk memimpin Malaysia, pada sisi yang lain Lee Kuan Yew juga menengarai dominasi sayap kanan dari UMNO yang ultra nasionalis (Soon: 1969, 159). Kekhawatiran Malaysia semakin meningkat ketika PAP ingin berpartisipasi dalam perpolitikan di Malaysia.

5.3.1 Beberapa Faktor kunci

Meskipun demikian, setelah Singapura merdeka pada tahun 1965, hubungan keduanya segera terjalin dengan baik. Berawal dari kerentanan Singapura, maka ia harus berjibaku

untuk menjaga kelangsungan hidup warga Singapura terutama dalam masalah ekonomi. Pada Aras ekonomi inilah, Lee Kuan Yew bahkan menyatakan akan berhubungan dengan hantu sekalipun demi bertahan hidup. *In the following day separation Lee Kuan Yew notice that Singapore would even trade with the devil to survive and indicated that economic relations with Malaysia must be based on quid pro quo basis* (Soon: 1969, 160). Pada bidang perdagangan dengan Malaysia, Lee Kuan Yew kembali menekankan pada pentingnya mengatur regulasi beacukai atau tariff.

Bidang terpenting kedua adalah hubungan pertahanan. Dalam perjanjian pemisahan (*separation Agreement*) disebutkan bahwa Pemerintah Singapura akan memberikan hak kepada Pemerintah Malaysia untuk melanjutkan pemeliharaan atas basis dan fasilitas militer di Singapura dan mengizinkan Malaysia untuk menggunakan basis dan fasilitas tersebut jika dipandang perlu (Article V, *Separation Agreement*).

Masalah pertama yang muncul adalah pembiayaan akomodasi bagi prajurit Malaysia yang ada di Singapura. Tunku Ambdul Rahman menyatakan bahwa sejak Malaysia dinyatakan mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas yang dirasa perlu, maka Pemerintah Singapura bertanggung jawab atas akomodasi tersebut. Begitu pula sebaliknya jika Singapura menginginkan akomodasi atas prajurit Singapura di Malaysia, ia juga akan melakukannya. Inilah yang menjadikan keberatan bagi Singapura yang merasa bahwa keduanya belum mempunyai perjanjian pertahanan. Kekhawatiran ini berlanjut sebagaimana dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam bahwa Malaysia salah memahami terhadap

dictum hak untuk mengontrol basis dan fasilitas pertahanan tanpa memperhatikan apakah Singapura menginginkannya atau tidak. Yang dikhawatirkan oleh Singapura adalah, atas alasan tersebut akan menjadi preseden untuk menjadi pangkalan permanen bagi kekuatan Malaysia di Singapura. Menurut Dr. Goh Keng Swee, konflik atas masalah ini dapat diselesaikan andai saja Malaysia berkehendak untuk menerima kemerdekaan Singapura sepenuhnya, serta menjadi partner pertahanan yang sejajar.

Poin ketiga menurut Liu Teik Soon adalah hubungan politik. Tensi hubungan politik kedua negara memang terasa tinggi di awal kemerdekaan Singapura. Lee Kuan Yew tidak memungkiri bahwa akan memerlukan waktu yang tidak cepat untuk membuat hubungan Singapura–Malaysia menjadi dingin. Rajaratnam juga menambahkan bahwa tidak bisa dihindari bahwa dalam hubungan bilateral kedua negara akan berusaha untuk saling memanfaatkan atau mengedepankan kepentingan masing-masing. Belum genap sebulan misalnya Malaysia telah melayangkan dua nota protes, di antaranya protes terhadap pernyataan Lee Kuan yew yang dianggap dapat menimbulkan ketegangan, termasuk tuduhan bahwa Rezim Tunku Abdul Rahman telah bekerja sama dengan partai oposisi di Singapura. Protes kedua menyangkut masalah pernyataan Pemerintah Singapura bahwa Malaysia masih merupakan “*mediaeval feudal society*” dan Pemerintah Malaysia adalah masih “*inefficient and bogged down by corruption*” serta para penguasanya mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokratis (Article V, Separation Agreement).

Meskipun hubungan tersebut nampak memanas, tetapi kedua negara sadar bahwa di antaranya terdapat hubungan kesalingtergantungan. Sebagaimana dijabarkan oleh S. Jayakumar selama menjadi menteri Luar Negeri Singapura. Dalam hubungannya dengan Malaysia, Singapura mempunyai setidaknya 8 agenda terpenting di antaranya adalah:

1. Implementation of the Points of Agreement (POA)
2. Long-term supply of water after expiry of the current water agreement
3. Revision of current price of water
4. Proposal to replace the Causeway with the bridge
5. Issues concerning customs, Immigrations and Quarantine (CIQ) facilities for railway passengers,
6. Malaysia's ban on sand supply,
7. Use of Malaysian airspace by RSAF
8. Early withdrawal of CPF monies by West Malaysians. (Jayakumar: 2011, 205)

POA singkatan dari *Point of Agreement* yakni perjanjian antara Malaysia dan Singapura tentang tanah di sekitar rel kereta api Malaysia yang membentang di Singapura.

Menurut Linda (*Relationship Between Malaysia And Singapore*), terdapat beberapa kunci hubungan antara Singapura dengan Malaysia. Pertama adalah masalah perbedaan geopolitik dan persoalan rasialisme yang rentan antarkeduanya. Singapura dengan luas 1/570 dari Malaysia

dihuni oleh sebagian besar etnis Cina dengan 75.4% dan etnis Melayu hanya 13.6%, sisanya adalah India dan lain-lain. Ukuran yang kecil ini tak menempatkan Singapura pada ras yang rentan terhadap gangguan keamanan dari luar serta persoalan minoritas dalam intra ASEAN.

Kedua adalah saling ketergantungan dalam persoalan pertahanan. Belajar dari sejarah perang dunia II di mana Jepang membombardir Malaysia, maka kedua negara ini berada pada posisi yang saling membutuhkan dalam hal pertahanan. Ketiga, adalah persoalan kesejahteraan ekonomi, meliputi akses terhadap sumber sumber alam, keuangan dan pasar. Hal ini terlihat jelas misalnya bahwa Malaysia adalah partner terbesar ketiga bagi Singapura dalam perdagangan.

Keempat, adalah kedekatan wilayah antarkeduanya yang memungkinkan migrasi antarkedua warga sangat intens sehingga menimbulkan berbagai hubungan termasuk hubungan yang bersifat pribadi. Dalam suatu kesempatan, Datuk Seri Ahmad Badawi pernah menyatakan *“to many Singaporeans, Malaysia is their ancestral Island. There is therefore, a sense of brotherhood on the part of Malaysia is about what happens to their kind in Singapore and vice versa....There is anger and concern when Singapore is perceived, rightly or wrongly, to be doing things against the interest of Malays and Malaysia.”* (Linda: 2017).

5.3.2 Akomodasi Kepentingan Malaysia

Eksistensi Singapura yang rentan, dan kerumitan hubungan dengan Malaysia, memberikan pengaruh pada pola akomodasi kepentingan kedua belah pihak. Di antara akomodasi kepentingan tersebut misalnya adalah perizinan

penggunaan fasilitas militer di Singapura oleh Malaysia, dan penguasaan tanah di sekitar Kereta api Tanah Melayu (KTM).

Meskipun telah resmi menjadi sebuah negara yang merdeka, Singapura masih mempunyai beberapa persoalan yang bisa melukai kedaulatannya. Di antaranya adalah keharusan Singapura untuk menyisakan sebagian dari kedaulatannya untuk menerima kehadiran pasukan Malaysia di negerinya. Kehadiran militer sebuah negara di negara lain sebenarnya merupakan yang diharamkan kecuali oleh karena perjanjian tertentu atau dalam kerangka kerja sama keamanan.

Meskipun telah mendapatkan kemerdekaannya Pemerintah Singapura harus memberikan ruang demi penempatan pasukan Malaysia di Singapura. *Singapore will give the Malaysian Government the right to continue to maintain the bases and other facilities used by its military forces in Singapore and will allow Malaysia to use these bases and facilities as the Malaysian Government may consider necessary.*(Soon 1969). Akomodasi seperti ini dilakukan mengingat posisi Singapura yang rentan pasca merdeka.

Selain itu Singapura juga harus merelakan sebagian wilayahnya dikuasai Malaysia, khususnya pada jalur rel kereta api, 'Kereta api Tanah Melayu' (KTM). Malaysia masih menguasai tanah di sepanjang rel kereta api KTM seluas 200 hektar yang melintasi tiga stasiun yakni Woodland, Bukit Timah dan Tanjung Pagar.(Ganesan: 1999). Rel kereta ini telah beroperasi sejak era kolonial Inggris pada tahun 1918 yang melintasi kawasan Singapura sepanjang 20 km.

5.4 Politik Luar Negeri Singapura terhadap Indonesia

Indonesia adalah negara dengan batas geografis paling dekat dengan Singapura. Seperti layaknya hubungan bertetangga, Indonesia merupakan musuh paling potensial, sekaligus kawan paling diharapkan. Oleh karenanya Singapura harus mampu menjaga hubungan dengan Indonesia untuk melindungi dan mencukupi kepentingannya. Dengan kerentanan sedemikian rupa seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, Singapura harus mampu menjaga ritme hubungan dengan Indonesia.

Terdapat beberapa keistimewaan Indonesia bagi Singapura. Pertama Indonesia adalah negara yang berbatasan langsung dengan Singapura setelah Malaysia. Sebagaimana negara baru lainnya, negara yang baru merdeka mempunyai potensi konflik perbatasan dengan negara tetangganya. Kedua, secara politik, dalam struktur tatanan politik regional, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang sekaligus dianggap sebagai kakak tuanya negara-negara di kawasan. Peran Indonesia pasca Perang Dunia II di kawasan ini sangat menonjol, seiring dengan popularitas Presiden Soekarno di mata internasional.

Ketiga, Indonesia adalah negara terdekat dengan potensi sumber daya yang melimpah yang diperlukan oleh Singapura baik dari sisi dukungan politik maupun sumber daya alam yang sangat melimpah yang sangat dibutuhkan oleh Singapura. Dari sisi politik, terdapat kedekatan hubungan antara kedua pemimpin negara Lee Kuan Yew dan Soeharto (Desker: 2015).

Bagi Indonesia, Singapura adalah negara yang cukup makmur, dan pada tataran faktual di lapangan, Singapura

merupakan salah satu tempat di mana para pekerja Indonesia mencari nafkah sehari-hari. Menurut catatan Bank Indonesia terdapat lebih dari satu setengah juta orang Indonesia bekerja di Singapura (Bank Indonesia). Hal ini merupakan salah satu dimensi hubungan kesalingtergantungan antara Indonesia dan Singapura. Oleh karenanya dalam bagian ini akan dibahas beberapa hal penting meliputi Era konfrontasi, politik rekonsiliasi, pengelolaan *Flight Information Regional* dan masalah *Defense Cooperation Agreement*.

5.4.1 Era Konfrontasi

Jauh sebelum kemerdekaan Singapura merdeka pada tahun 1965, hubungan Indonesia Singapura telah dimulai selepas Indonesia Merdeka tahun 1945, meskipun pada masa tersebut, Malaysia dan Singapura masih berada dalam pangkuan pemerintah kolonial Inggris. Kedekatan Pemerintah Soekarno dengan Uni Soviet telah memberikan pengaruh negatif terhadap hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Pemerintah Indonesia misalnya memberikan dukungan dengan mengatakan bahwa pernikahan Maria Hertogh dan Mansoor dari Malaysia adalah syah, meskipun pengadilan pemerintah kolonial Inggris telah menyatakan batal. Salah satunya adalah kebijakan konfrontasi Indonesia Malaysia sejak 1962.

Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia terjadi setelah pembentukan Federasi Malaysia yang meliputi Malaysia, Sabah, Serawak, Brunei dan Singapura. Pembentukan ini ditentang oleh Indonesia karena dianggap sebagai proyek dari pemerintah kolonial Inggris yang oleh Soekarno disebut sebagai Nekolim (neo kolonialisme dan imperialism).

Kebijakan konfrontasi secara resmi lahir pada 20 Januari 1963, ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia.

Pada 27 Juli 1963 Soekarno menyatakan akan mengganyang Malaysia setelah sebelumnya terdapat beberapa aksi propaganda melawan Malaysia. Serangan serangan sporadis pun telah dimulai dengan mengirimkan pasukan baik relawan maupun Tentara nasional Indonesia. Tetapi berbagai serangan ini dapat ditanggulangi oleh Malaysia dan Inggris. Ketika Perserikatan Bangsa Bangsa menerima keanggotaan Malaysia, maka Indonesia menyatakan keluar dari PBB.

Terkait dengan Singapura, peristiwa penting adalah pengeboman Ruma McDonald oleh dua tentara Indonesia. Pada kebijakan konfrontasi ini terdapat suatu peristiwa yang langsung berkaitan dengan eksistensi Singapura. Sebagai bagian dari Federasi Malaysia, Singapura merupakan salah satu sasaran serangan Indonesia. Dua prajurit Tentara Nasional Indonesia Serda Harun dan Kopral Usman melakukan pengeboman terhadap Rumah MacDonald House pada tanggal 20 Maret 1965 di kawasan Orchard Road. Akibat dari pengeboman ini tiga orang meninggal dunia dan lebih dari dua puluh orang terluka. Sementara itu Serda Harun dan Kopral Usman tertangkap kerana boat nya kehabisan bahan bakar dan dijatuhi hukuman mati.

Peristiwa ini seperti selayaknya serangan teror belaka, namun hal ini adalah bagian dari skenario konfrontasi Malaysia. Serangan ke Rumah Malcom MacDonald tersebut memang terencana sebagai salah satu strategi perang dengan sabotase dan operasi intelijen. Serangan ini dimaksudkan

untuk menimbulkan kepanikan dan memberikan peringatan kepada Singapura, Malaysia maupun Inggris akan ketegasan Indonesia. MacDonald adalah seorang anak mantan Perdana Menteri di Inggris Ramsay MacDonnald yang sekaligus anggota British High Commisioner untuk Asia. Malcom MacDonald juga pernah mencetuskan gagasan pembentukan federasi Singapura, Sabah Serawak.

5.4.2 Rekonsiliasi

Gagalnya pihak komunis mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965 yang diikuti oleh jatuhnya Pemerintahan Soekarno digantikan oleh Soeharto. Berbeda dengan Soekarno yang pro dengan Uni Soviet, Soeharto memilih untuk berada di posisi yang lebih berpihak kepada Amerika Serikat. Meskipun demikian, hal ini tidak lantas menjadikan kedua belah pihak membaik. Singapura melanjutkan proses peradilan terhadap dua tersangka anggota TNI yang terlibat dalam pengeboman Rumah McDonald. Akhirnya keduanya dieksekusi hukuman gantung pada 1968. Reaksi masyarakat Indonesia kian panas.

Menyadari pentingnya hubungan dengan Indonesia, Lee Kuan Yew mencoba memperbaiki hubungan dengan rencana kunjungan ke Indonesia. Upaya rekonsiliasi ini awalnya ditanggapi dingin oleh Soeharto, dengan mengajukan syarat, boleh berkunjung ke Jakarta tetapi harus melakukan tabur bunga di taman makam Usman dan Hamid, dua prajurit yang digantung di Malaysia. Pragmatisme Lee Kuan Yew muncul mengalahkan segala prestisiusnya seorang pemimpin dengan menyetujui syarat yang ditawarkan oleh Indonesia. Lee Kuan Yew mengunjungi Indonesia pada bulan Mei 1973

Pendekatan ini menandai era rekonsiliasi hubungan antara Indonesia dengan Singapura.

Pasca pertemuan tersebut, Indonesia dan Singapura saling membantu dalam persoalan pangan. Itikad baik Soeharto dalam mengembalikan pinjaman beras disambut antusias oleh Lee Kuan Yew dengan mengatakan bahwa Soeharto adalah orang yang bisa dipercaya (Strait Times: 2015). Tahun-tahun berikutnya adalah masa-masa keemasan hubungan antara Indonesia dengan Singapura.

Persoalan hubungan keduanya pernah muncul kembali ketika Singapura menyatakan *abstain* menghadapi resolusi PBB tentang Timor Timur, sementara negara-negara Asean yang lain mendukung Indonesia.

But differences did occur. Following the Indonesian invasion and occupation of East Timor in December 1975, Singapore was the only Asean country to abstain while the remainder joined Indonesia in opposing a UN General Assembly resolution deploring Indonesian military intervention in East Timor. This created some strains in the bilateral relationship. In the aftermath of the Vietnamese invasion and occupation of Cambodia in December 1978, Indonesia consistently took a softer position than the other Asean countries partly because Indonesia saw Vietnam as having a shared revolutionary heritage gaining independence through the force of arms rather than through consultations with the colonial regime and partly because President Soeharto was suspicious of Chinese support for the Khmer Rouge and regarded Vietnam as a bulwark against Cina (Strait Times: 2015).

Tetapi komitmen Soeharto untuk menjaga solidaritas Asean tidak membuat hubungan Indonesia dan Singapura

menjadi retak kembali. Situasi Indonesia selepas dari Rezim Soekarno yang pernah ingin mengganyang Malaysia dimanfaatkan oleh Lee Kuan Yew untuk melakukan rekonsiliasi hubungan antarkedua negara yang retak pasca jatuhnya hukuman mati terhadap dua prajurit Indonesia Usman dan Harun pada tahun 1968.

Upaya ini harus ditebus dengan biaya “mahal” oleh Lee Kuan Yew terhadap syarat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Syarat tersebut adalah Lee Kuan Yew harus melakukan kunjungan ke Makam Pahlawan Harun dan Usman di Kalibata Jakarta. (Liputan6: 2013) Sebenarnya hal ini merupakan permintaan yang sulit karena akan berarti pengakuan ketidakbersalahan Usman dan Harun, sekaligus mengakui kesalahan Singapura atas putusan hukuman mati. Kunjungan seperti ini adalah sangat sensitif.

Meskipun demikian, oleh beberapa pihak singapura, kunjungan ini tidak dimaknai sebagai sebuah ketundukan Lee Kuan Yew terhadap Soeharto, melainkan sebagai sebuah upaya diplomasi yang strategis. Diplomasi ini kemudian dikenal sebagai diplomasi kuburan. (Ali, 2016). Diplomasi ini diyakini mampu untuk melunakkan sikap keras Indonesia dalam hubungannya dengan Singapura khususnya dalam persoalan hukum menyangkut Usman dan Harun. Hasilnya adalah kehangatan hubungan kedua negara, terutama setelah dilakukan kunjungan balasan oleh Soeharto ke Singapura pada bulan Agustus 1974. (Liputan6:2015).

Sebagai perbandingan adalah masyarakat Korea dan Cina selalu melayangkan protes apabila Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Kui Yashukuni, meskipun itu adalah nenek moyang mereka sendiri. Nampaknya, Lee

Kuan Yew mempunyai perhitungan lain, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terpenting bagi Singapura sekaligus ancaman potensial. Pendekatan harus dilakukan meskipun dengan syarat yang tidak ringan. Akomodasi terhadap kepentingan negara lain perlu dilakukan demi menjaga kepentingan nasionalnya yang lebih besar.

5.4.3 Kerjasama Pengelolaan Wilayah Udara

Kerentanan utama Singapura adalah karena wilayahnya yang sangat sempit. Jarak yang hanya 40 km dari ujung timur ke ujung barat dapat dilalui oleh pesawat tempur kurang dari 10 detik. Hal ini sungguh ironis dengan upaya menjadikan Singapura sebagai pelabuhan transit baik laut maupun udara. Potensi negara kecil tetapi berada di tengah pusara dunia ini, memberikan inspirasi bagi pengembangan industri penerbangan Singapura sebagai salah satu unggulan pelayanan jasa. Pelabuhan udara Chang I diresmikan tahun 1981 yang merupakan bandara terbesar di Asia Tenggara.

Pembangunan Chang I sebagai Bandar udara internasional terbesar tentu saja memerlukan berbagai sarana termasuk pengelolaan wilayah udara. Peningkatan kapasitas bandar udaranya diikuti dengan upaya untuk memperoleh otoritas pengelolaan area penerbangan yang kemudian disebut dengan *Flight Information Regional* atau FIR. Pengelolaan FIR ini ditetapkan oleh organisasi penerbangan dunia ICAO. Pada masa kepemimpinan Mah Bow Tan dalam Mah Bow Tan, Singapura berhasil mendapatkan pengelolaan FIR.

Flight Information Regional adalah suatu area di mana pengelolaan penerbangan dilakukan oleh suatu otoritas yang diberi kewenangan oleh Organisasi Penerbangan Internasional

(*International Civil Aviation Organization*). Hak pengelolaan ini diberikan ketika jumlah penerbangan di suatu area sangat padat dan memerlukan pengaturan secara khusus untuk menjamin keselamatan penerbangan. Dalam hal ini, Singapura mempunyai kepadatan tertinggi di Asia tenggara di mana frekwensi *take off landing*nya mencapai kurang dari satu menit (Yani: 2017, 2). Pemberian otoritas kepada Singapura ini juga didasari pada kemampuan secara teknis untuk mengaturnya.

Kewajiban utama pengelola adalah memberikan pelayanan navigasi demi keamanan dan keselamatan penerbangan guna menghindari bahaya tabrakan di udara. Layanan ini disebut dengan *Flight Information Service*. Dalam keadaan darurat pihak pengelola juga diwajibkan memberikan layanan panduan penerbangan mengenai masalah sektornya seperti kehilangan arah, kerusakan mesin, kehabisan bahan bakar dan lain-lain yang disebut dengan *Alerting service* (Yani: 2017, 3).

FIR ini disepakati oleh Indonesia dan Singapura pada 21 September 1995 di Singapura. Menjadi menarik adalah dalam kesepakatan FIR tersebut justru wilayah terluas adalah menggunakan wilayah Indonesia. Indonesia mendelegasikan pengelolaan penerbangan untuk wilayah dengan koordinat 90 nm dari SINJON yang disebut wilayah A, dan sektor B yang meliputi wilayah dengan koordinat 05 00"N dst. Wilayah C tidak termasuk dalam skema FIR.

Meskipun dalam perjanjian FIR semua pihak tetap mematuhi hak kedaulatan masing-masing negara, tetapi pada pelaksanaannya menimbulkan masalah khususnya bagi negara

yang mendelegasikannya (Indonesia). Akibat dari kesepakatan FIR ini misalnya ada beberapa konsekuensi:

1. Singapura memiliki legalitas untuk memasuki wilayah tersebut cukup dengan izin *Air Traffic Control* (ATC) Singapura.
2. Sebaliknya pesawat Indonesia harus mendapatkan izin dari ATC Singapura di zona FIR sebelum memasuki wilayah udara di luar FIR. Hal ini berlaku untuk pesawat pemerintah Indonesia maupun pesawat TNI yang akan melakukan patroli keamanan termasuk pesawat kepresidenan. (Yani: 2017, 8)

Pengelolaan FIR oleh Singapura memang merupakan hal memprihatinkan bagi Indonesia. Wilayah udara Indonesia yang sangat luas (81% dari wilayah udara Asean) dikendalikan oleh Singapura (yang hanya 1% dari wilayah udara Asean). Pengendalian wilayah udara ini jelas dinilai oleh Indonesia sangat merugikan, karena dengan pengendalian udara dapat pula mengendalikan daratan dan perairan, karena daratan dan perairan akan sangat mudah dimonitor melalui udara. Masalah akan muncul nanti bila Indonesia berupaya mengambil alih pengelolaan FIR ini dari Singapura.

Kedua, Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, ketiga, potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh Singapura serta kedekatan khusus antara Lee Kuan Yew dengan Soeharto. Pada saat ini, bila kita duduk di pinggir pantai di Tanjung Datuk, Tanjung Pinggir, Pulau Batam, Indonesia, nampak dengan jelas gedung-gedung

pencakar langit di Singapura. Gedung-gedung pencakar langit dan Flyer yang terlihat jelas tersebut menyemburkan larva kemewahan dan keberhasilan Singapura melakukan pembangunan di berbagai bidang dengan dunia luar. Sebaliknya posisi Indonesia semakin tidak menentu, apalagi setelah Pulau Batam saat ini (2017) mengalami kelesuan ekonomi yang begitu fenomenal. Menyebabkan ekonomi Pulau Batam yang banyak di pengaruhi roda ekonomi Singapura seakan meredup. Kapal-kapal yang antri untuk merapat ke pelabuhan-pelabuhan di Singapura tersusun rapi di lepas pantai Singapura. Hilir mudik Yach mewah di perairan Selat Phillip berbanding terbalik dengan perusahaan raksasa seperti McDermott yang ada di Batu Ampar Pulau Batam Indonesia karena sepi orderan dan banyak karyawan yang dirumahkan.

Gambaran di atas, seakan menandakan kelesuan atau setidaknya pasang surut hubungan Singapura dan Indonesia. Karena Pulau Batam digambarkan bukan sebagai suatu daerah tapi adalah representasi Indonesia yang kelihatan dengan jelas dari Singapura. Hilir mudiknya beberapa pelabuhan di Pulau Batam seperti Nongsa, Harbour Bay, Batam Center dan Sekupang menuju Singapura atau sebaliknya menjadi salah satu pintu masuk kedua negara yang paling padat dilalui oleh orang-orang dari kedua negara.

Pada dasarnya hubungan Singapura dengan Indonesia sudah dilakukan sejak lama yaitu sejak Singapura dikeluarkan dari Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965. Partai Tindakan Rakyat (PAP) yang dipimpin Lee Kwan Yew membentuk pemerintah sendiri terlepas dari bagian negara Malaya. Pada awalnya hubungan tersebut masih bersifat apa adanya.

Artinya belum ada komunikasi dan kontak-kontak politik yang signifikan karena Singapura masihlah berupa satu daerah yang sama dengan Indonesia yaitu belum maju. Akan tetapi, proses politik yang terjadi saat itu ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dalam perebutan daerah di Kalimantan bagian Sabah, Serawak dan Brunei Darussalam, presiden Soekarno menyatakan Operasi Konfrontasi Malaysia, menambah kekuatan anak negeri Malaysia, dengan nasionalisme mengusir dan kejahatan terhadap anak perantau meremak luas, sampai akhirnya berpuncak pada tanggal 9 August 1965, Parlemen Malaysia mengesahkan menyingkirkan Singapura dari Federasi Malaysia, dengan vote 126-0 (Kompasiana: 2014). Pihak anak negeri yang biasa disebut UMNO, dipimpin oleh Tengku Abdul Rahman merasa tidak percaya dengan anak perantauan yang dipimpin oleh pihak PAP, Lee Goh, lalu dilanjutkan dengan Lee Kwan Yew (Kompasiana: 2014).

Dalam perkembangan terkini Singapura melupakan fondasi politik yang sudah dibangun bersama Indonesia. Bahkan setelah Lee Kwan Yew tidak lagi menjadi Perdana Menteri sejak tahun 1990, hubungan Indonesia dan Singapura tidak dalam keadaan baik. Kedua negara selalu mengalami pasang surut dan kadang kala menjadi musuh dalam selimut. Banyak persoalan yang patut dicurigai dari sikap Singapura yang menjalankan Politik Luar Negeri terlalu mengedepankan Kepentingan Nasionalnya secara berlebihan tanpa melihat keadaan negara di sekelilingnya.

Padaahal menurut H. J. Morgenthau, *“any foreign policy which operates under the standard of the national interest”*. Kepentingan nasional sebagai standar penilaian dan tindakan

membutuhkan jalan lain yaitu diplomasi guna meminimalkan konflik dengan kepentingan lainnya (Pham: 2008, 262). Pendapat ini merujuk pada upaya-upaya diplomasi yang mencerminkan harmonisasi dalam segala bidang menyangkut bagaimana membangun hubungan dengan negara lain. Walaupun Politik Luar Negeri Singapura mendasari hubungan baik akan tetapi beberapa kasus yang menjadi titik lemah kita selalu dimanfaatkan Singapura. Politik luar negeri tidak hanya berupa interaksi formal antar satu negara dengan negara lain tapi juga bisnis. Politik dan strategi juga ikut bermain di dalamnya. Itu sebabnya dalam konteks hubungan internasional politik luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Secara formal Indonesia dan Singapura adalah sama-sama anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.

Dalam prakteknya, Singapura selalu mencari titik lemah Indonesia agar bisa dimanfaatkan. Sifat politik luar negeri Singapura sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik kawasan. Selain itu, terhadap negara-negara di kawasan terutama Indonesia dan Malaysia selalu merefleksikan kepentingan nasional negara lain seperti Israel. Lee Kuan Yew memerintahkan Keng Swee untuk menghubungi Mordechai Kidron, duta besar Israel yang berkedudukan di Bangkok pada tanggal 9 September 1965, hanya beberapa bulan setelah pemisahan Singapura dari Malaysia. Sejak itu, Singapura dan Israel menjalin hubungan di semua bidang seperti ekonomi, teknologi militer dan pelatihan militer. Apalagi diketahui Israel tidak memiliki

hubungan diplomatik dengan Indonesia. Segala kepentingan Israel di Asia Tenggara semua diurus Singapura.

Persepsi Singapura yang selalu menyebut Indonesia sebagai ancaman menjadi biang keladi kenapa Singapura terus merasa terancam dengan Indonesia. Wujud rasa terancam ini dapat dilihat dari anggaran militer yang terus meningkat dan melebihi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Departemen Keuangan Singapura menerbitkan rilis daftar anggaran pertahanan negara untuk tahun fiskal 2016-2017 (yang dimulai pada tanggal 1 April) yang berjumlah SG\$13.97 miliar (US\$10.2 Miliar). Dengan demikian, anggaran pertahanan Singapura akan meningkat 6,4% dibandingkan dengan anggaran untuk tahun fiskal 2015-2016, ini merupakan kenaikan terbesar dalam belanja pertahanan sejak tahun 2011. Rata-rata dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan anggaran pertahanan Singapura adalah sekitar 3,5% per tahun. Angka ini saja sudah menunjukkan bahwa Singapura dalam menjalankan politik luar negeri menekankan pada peningkatan pertahanan. Bukan itu saja dari berbagai sumber informasi ada yang agak mengejutkan. Bahwa Singapura sangat takut dengan Indonesia. Sehingga tarik ulur politik luar negerinya terhadap Indonesia selalu dibumbui kepentingan nyata. Singapura memandang Indonesia sebagai teman tetapi juga musuh. Sehingga persepsi ancaman dari Indonesia selalu menjadi tekanan dan Singapura bersiap untuk mempertahankan diri. Bukan saja negara yang besar tetapi militer Indonesia dianggap sebagai ancaman serius. Salah satu sebabnya adalah Singapura berada di tengah-tengah tetangga yang penduduk mayoritasnya etnis Melayu dan jauh lebih besar ukuran geografisnya, penduduknya dan sumber

daya alamnya. Sedangkan negara Singapura mayoritas penduduknya adalah etnis Cina dengan demikian, negara kota ini senantiasa berada dalam kawasan yang tidak menentu.

Kasus kepemilikan saham Telkomsel sebesar 35% oleh perusahaan Singapura yaitu *Singapore Telecommunication* (Singtel) dan Indosat sebesar 41% oleh *Singapore technologies Telemedia* (STT) yang merupakan anak usaha Temasek Holding Company, *Multi National Corporation* (MNC) asal Singapura (Nuswantoro Dipantara Mercusuar NKRI: 2015). Bahaya kepemilikan ini menjadi keuntungan Singapura karena bisa memperoleh semua data penting dari aliran komunikasi yang menggunakan jaringan saluran komunikasi Telkomsel dan Indosat. Pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia bahkan rahasia negara kita dapat dicuri oleh Singapura. Ini disebabkan salah satunya karena Temasek memiliki 41% pada Indosat yang merupakan pemilik satelit kebanggaan kita yaitu satelit Palapa, sehingga semua informasi dan data-data yang seharusnya menjadi rahasia negara RI dapat diperoleh dengan mudah oleh Singapura serta keamanan nasional (*National security*) akan kedaulatan Indonesia pun terancam. Keamanan merupakan perisai bagi setiap bangsa atas ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam serta menyangkut kepada masyarakat yang menjadi penghuni suatu negara (Nuswantoro Dipantara Mercusuar NKRI: 2015).

Begitu juga dengan perjanjian *Defence Cooperation Agreement* (DCA) antar Indonesia-Singapura yang ditandatangani di Bali pada tanggal 16 Juli 2007. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik

Indonesia, Yuwono Soedarsono dan Menteri Pertahanan Singapura Theo Chee Hean (Antara News: 2011).

5.5 Jaminan Pemerintah Singapura Terhadap Eksistensi Islam

Lingkage atau pertalian antara kaum Muslim Melayu dengan komunitas Islam di Malaysia dan Indonesia, telah menciptakan serangkaian tekanan atau *pressure* terhadap proses politik di Singapura. Meski pada posisi minoritas, kekuatan Muslim Melayu mendapat perlakuan istimewa dan mempunyai *previledge* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Singapura. Tekanan yang datang dari Malaysia dan Indonesia telah memaksa pemerintah Singapura untuk membuat kebijakan kebijakan yang ramah terhadap Islam, atau *Islamic friendly*. Kebijakan kebijakan ini jelas akan menjamin eksistensi kelompok Muslim yang secara kewaktuan presentasenya terus mengecil.

Mengelola negara yang multi-kultural dalam proses pembangunan kebangsaan memerlukan kehati-hatian. Melihat kondisi seperti ini Lee Kuan Yew harus memberikan ruang terhadap eksistensi komunitas Melayu sebagai penduduk asli Singapura. Menurut Sidek Sanif, Lee Kuan Yew berkikap toleran bahkan *beyond tolerance* terhadap semua etnis di Singapura terutama dengan Mulsim meskipun bukan sebagai kelompok mayoritas. Dalam kesempatan seperti ini lebih baik mengambil persamaan dari pada perbedaan. (Sanif: 2016).

Respons pemerintah Singapura yang akomodatif ini sebenarnya sangat logis dan strategis mengingat tekanan itu sewaktu waktu dapat berubah menjadi sebuah konflik yang berujung pada bencana kemanusiaan. Sebagai contoh adalah

dukungan yang muncul dari Malaysia atas kekalahan UMNO dan penentangan perayaan kemenangan PAP pada pemilu 1959 telah berubah menjadi sebuah kerusuhan rasial yang memakan korban jiwa. Jika kerusuhan tak mampu diredam dengan baik, maka hal ini akan menjadi ancaman terhadap eksistensi etnis Cina di Singapura karena jumlah mereka yang sedikit dan posisi mereka yang terkepung oleh kaum Muslim. Oleh karenanya, meskipun pilihan utama pemerintah Singapura adalah menciptakan masyarakat dan bangsa yang bersifat multi kultur, namun pemberian *previledge* bagi kaum Muslim adalah pilihan yang paling moderat.

Pemberian jaminan eksistensi terhadap kaum Muslim Melayu meliputi jaminan pada konstitusi hingga pada tataran praktis termasuk jaminan pelaksanaan kehidupan beragama, jaminan pendidikan Islam, jaminan makanan halal, jaminan kebebasan berserikat bahkan sampai jaminan untuk memberlakukan sistem keuangan Islam (*Islamic finance*). Berikut ini adalah pemaparan tentang pelembagaan hak hak istimewa kaum Muslim Melayu dari tataran konstitusi hingga pada tataran praksis di lapangan.

5.5.1 Promosi Etnis Melayu dan Bahasa Melayu

Pada upaya pembangunan negara dan pembangunan bangsa pasca kemerdekaan, terdapat dua hal penting untuk digarisbawahi. Pertama adalah pengangkatan Yusof Ishak sebagai presiden dan penetapan Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan pengakuan Etnis Melayu sebagai penduduk asli Singapura yang dicantumkan dalam konstitusi.

Yang pertama, sebagai pemenang dalam pemilu-pemilu sebelumnya, Lee Kuan Yew sebenarnya mempunyai

keleluasaan untuk menempatkan orang-orang terdekatnya dalam posisi strategis di pemerintahan. Artinya, ia bisa saja menempatkan orang-orang terdekatnya yang umumnya adalah etnis Cina dan India, mengingat ia tak begitu dekat dengan Melayu yang sejauh ini cenderung menampilkan sikap konfrontatif terhadap etnis Cina, dilihat dari beberapa kerusuhan rasial yang muncul sebelumnya.

Pengangkatan Yusof Ishak, dengan demikian, dapat dimaknai sebagai sebuah upaya simbolis mengangkat posisi kelompok Melayu, paling tidak sebagai upaya untuk menampilkan keterwakilan Melayu dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk dapat meredam gejolak yang mungkin timbul apabila terdapat ketidakpuasan di kalangan Melayu. Dalam sebuah analisisnya, Ashraf Jamal, seorang penulis senior, mengatakan bahwa pengangkatan presiden dari etnis Melayu juga dilakukan untuk mendapatkan simpati dari Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman. *“Lee Kuan Yew wanted a distinguished Malay as our first Head of State to show the Federation of Malaya that Singaporeans accepted Malays as their leaders and to forge good relations with Prime Minister Tunku Abdul Rahman of Malaya and other ... Malay leaders in the Federation.”* (Jamal: 2017)

Pendapat lain yang senada mengungkapkan bahwa pengangkatan Yusuf Ishak sebagai presiden didukung oleh empat faktor. Pertama, pengangkatan ini akan memberikan kesan baik tentang Singapura di hadapan Malaysia dan Indonesia, bahwa Singapura juga merupakan bagian dari Melayu. Kedua, Untuk memberikan kesan bahwa Singapura bukanlah Cina yang ketiga setelah Taiwan. Ketiga, dengan mengangkat Yusof Ishak, maka tak perlu lagi ada pemilihan

presiden yang tentunya membutuhkan biaya dan waktu lama, dan keempat adalah Lee Kuan Yew segera menyelesaikan polemic tentang siapakah yang harus menjadi presiden (Truth: 2016)

Meskipun demikian, menari juga untuk mengetahui, mengapa Yusof Ishak yang di angkat, bukan tokoh lain. Terdapat beberapa alasan tentang hal ini. Pertama, Yusof Ishak adalah orang yang telah ditunjuk sebagai Yang Dipertuan Agung oleh Pemerintah Malaysia pada 1963. Kedua, Yusof Ishak adalah seorang direktur dari sebuah media masa paling populer saat itu yakni Utusan Melayu. (Istana: 2013).

Promosi terhadap eksistensi Muslim melayu juga terjadi pada ranah kelembagaan perundangan. Dengan tegas, penyebuta melayu masuk dalam konstitusi untuk dua hal : pengakuan Melayu sebagai “*indegenuos peoplr*” atau penduduk asli serta pengakuan Melayu sebagai bahasa nasional. Terdapat beberapa bahasa resmi yang diakui di Singapura misalnya Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, dan Bahasa India. Namun yang dingkat sebagai bahasa nasional adalah Bahasa Melayu.

Konstitusi mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah *being the source of the government's power*. Ia adalah sumber dari kekuasaan Pemerintah. Pemerintah mengambil semua tindakan dan kebijakan berdasarkan pada mandat dari konstitusi. Konstitusi juga menyusun struktur kelembagaan tentang siapa yang mempunyai kewenangan atas suatu kebijakan negara, di antaranya adalah struktur lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua *Limiting the government's power*. Selain memberikan kekuasaan pada

lembaga lembaga negara, maka konstitusi sekaligus membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Oleh karenanya, melalui analisis “*content*” teladan atas konstitusi ini kita dapat melihat identitas, ciri atau karakter negara tertentu.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, Singapura adalah sebuah negara yang didominasi oleh etnis Cina (76%), sedang etnis Melayu sekitar 14.3%, India 7% dan sisanya adalah berbagai etnis yang lain. Oleh karenanya, Singapura menetapkan dirinya sebagai sebuah negara multikultur dan multi etnis. Artinya, meskipun mayoritas etnis adalah Cina, namun eksistensi semua etnis pada dasarnya sama di depan hukum atau undang undang.

Dalam konstitusi, persamaan di depan hukum tersebut tercantum dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 Konstitusi 1965.

(1) All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law.

(2) Except as expressly authorized by this Constitution, there shall be no discrimination against citizens Singapore on the ground only of religion, race, descent or place of birth in any law or in the appointment any office or employment under a public authority or in the administration of any law relating to the acquisition, holding, or disposition of property or the establishing or carrying on of any trade, business, profession, vocation or employment (Singapore’s Constitution 1965. Pasal 12).

Demikian juga dengan persoalan agama, Singapura tidak memberika privilegde untuk agama tertentu, melainkan

semua diperlakukan sama. Pasal 15 mengatur masalah tersebut. *“Every person has the right to profess and practice his religion and to propagate it.”* (Singapore’s Constitution 1965. Pasal 15).

Meskipun demikian, terdapat posisi yang sangat istimewa bagi etnis Melayu yang hanya berjumlah 14.3%. Terdapat pasal yang memberikan privileg atau kedudukan istimewa bagi etnis Melayu sebagaimana yang dimuat dalam pasal 152. Pasal yang mengatur posisi minoritas tersebut, menyatakan:

Article 152 Minorities and Special Position of Malays

(1) It shall be the responsibility of the Government constantly to care for the interests of the racial and religious minorities in Singapore.

(2) The Government shall exercise its functions in such manner as to recognize the special position Malays, who are the indigenous people of Singapore, and accordingly it shall be the responsibility of Government to protect, safeguard, support, foster and promote their political, educational, religious, economic, social and cultural interests and the Malay language (Singapore’s Constitution 1965. Pasal 152).

Setidaknya, pasal ini memberikan hak istimewa sebagai berikut:

1. Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan perlindungan secara terus menerus kepada kelompok minoritas.
2. Termasuk di dalam klausul pertama tersebut adalah perlindungan terhadap kelompok Melayu

3. Etnis Melayu diakui sebagai penduduk Asli Singapura, dengan demikian etnis yang lain seperti Cina dan India adalah pendatang.
4. Pemerintah Singapura akan menjamin keselamatan etnis Melayu, hak-hak politiknya, hak-hak ekonomi, hak pendidikan, hak beragama, serta perlindungan akan kepentingan sosial budaya etnis Melayu.
5. Perlindungan terhadap penggunaan Bahasa Melayu.

Tentu saja, pemberian hak hak khusus kepada etnis Melayu ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengingat Etnis lain seperti India dan Cina tidak pernah disebut dalam konstitusi. Ketika kita memahami bahwa konstitusi adalah hal mendasar dalam sebuah negara, maka sangat mungkin terdapat alasan yang mendasar punya mengapa terdapat penyebutan dan pemberian hak khusus terhadap etnis tertentu. Pada sisi yang lain, pemberian hak istimewa ini sebenarnya bertentangan dengan klausul pada pasal sebelumnya terkait persamaan di depan hukum bagi semua warga negara Singapura. Oleh karenanya, menarik untuk mengetahui alasan pemberian hak khusus kepada etnis Melayu ini.

Dalam suatu analisisnya, Eugene Tan menilai, bahwa pemberian status khusus ini bukan merupakan persoalan hukum, tetapi lebih karena persoalan politik. Menurutnya, *therefore, the constitutional safeguards as provided for in the article should be construed as political rather than legal* (Tan: 2009). Artinya, pemberian status khusus tersebut lebih

karena persoalan politik semata. Dengan demikian perlulah dikaji lebih mendalam pada konteks sejarah pada masa itu.

Konstitusi Singapura disahkan ketika Singapura berpisah dari Malaysia tahun 1965. Era yang paling krusial yang melatarbelakangi konstitusi ini terjadi antara tahun 1957 hingga 1965. Pada tahun 1957, Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, demikian juga Singapura mendapatkan hak *full government* di bawah kepemimpinan Lim Yew Hock. Tahun 1959, pemilihan umum digelar dengan kemenangan Partai Tindakan Rakyat yang mendapatkan 53 dari 51 kursi yang ada. Kemenangan ini menempatkan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri dan Yusof Ishak sebagai Presiden.

Tahun 1961 Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, mengajukan proposal penggabungan Malaysia dengan tiga daerah lain yakni Sabah, Serawak dan Singapura. Namun pada bulan Agustus 1965, Malaysia mengeluarkan Singapura dari Federasi Melayu dan membentuk negara merdeka yang baru. Masa dua tahun bergabungnya dengan Malaysia tersebut terdapat banyak peristiwa penting terkait hubungan etnis Melayu dan non Melayu dalam konteks nation building Singapura.

Pertama adalah hubungan yang kurang baik antara Pemerintah Pusat Malaysia di Kuala Lumpur dengan Singapura, serta kedua terjadinya kerusuhan rasial yang melibatkan etnis Melayu dan Cina di Singapura. Lee Kuan Yew sebenarnya merasa diperlakukan tidak adil oleh Malaysia, meski demikian dalam pernyataannya Singapura tidak ingin membalasnya. Dengan kata lain, Malaysia berpotensi untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat

merugikan Singapura, apalagi di Singapura terdapat etnis Melayu. Jika Singapura memperlakukan etnis Melayu dengan tidak baik, akan mengundang bahasa serangan dari Malaysia. Oleh karenanya, memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi etnis Melayu akan melunakkan sikap Malaysia.

Dalam pembelaannya di kemudian hari Lee Kuan Yew menyatakan *were determined that the Chinese majority in Singapore, having "suffered communal bullying and discrimination during the two years we were a part of Malaysia", will not discriminate against or bully any other race in turn* (Tan: 2009). Selama dua tahun bergabung dengan Malaysia, telah terdapat dua kali kerusuhan etnis pada Juli dan September 1964.

Semenjak terjadinya penggabungan antara Malaysia dengan Singapura, ketegangan dan konflik etnis antara Etnis Cina dan Etnis Melayu semakin meningkat. Etnis Melayu di Singapura sangat dipengaruhi oleh kebijakan Malaysia tentang Politik Pribumi yang memberikan hak hak khusus kepada Etnis Melayu sebagai penduduk asli Malaysia. Di Singapura, hal ini berlaku sama. Dengan slogan Malaysian Malaysia, Etnis Melayu merasa sebagai penduduk asli Singapura, sementara yang lain dianggap sebagai pendatang. Dan oleh karenanya, Melayu meminta hak hak khusus. Namun di Singapura, hal ini ditentang oleh Etnis Cina. Lee Kuan Yew bersama para pimpinan Partai Tindakan Rakyat lainnya berusaha untuk menghapus hak hak tersebut di Singapura dan sebagai gantinya adalah dengan memberikan advokasi bagi warga etnis Melayu. Dalam konsep tersebut, Lee menganggap bahwa orang-orang keturunan Cina juga

merupakan pemilik sah tanah Malaya, sebab mereka telah berhijrah ke negeri ini sejak 500 tahun lampau.

Pernyataan Lee Kuan Yew segera mendapatkan penentangan dari pimpinan UMNO Syed Jaafar Albar. Namun pendapat itu segera dibantah oleh politisi UMNO Syed Jaafar Albar. Albar berpendapat bahwa orang-orang Cina hanyalah kaum pendatang di Malaya, oleh karenanya mereka harus menghormati hak-hak dan supremasi bangsa Melayu. Ketegangan ini semakin memuncak hingga terjadi kerusuhan pada bulan 21 Juli 1964 yang menelan orban 23 orang meninggal dunia. Kerusuhan ini berawal pada dukungan dan provokasi oleh kaum nasional Melayu di Malaysia untuk memberikan hak hak khusus kepada etnis Melayu di Singapura. Permintaan ini ditolak oleh pihak Singapura. Memanfaatkan arak-arakan setelah perayaan maulid Nabi SAW, para politisi ultra-Melayu itu mendorong para peserta untuk bertindak anarkis. Dalam kerusuhan ini 3.000 orang ditahan, termasuk 600 orang anggota sindikat rahasia. Di awal bulan September 1964 kerusuhan antar etnis kembali meledak. Rusuh kali ini dipicu oleh tewasnya tukang becak Melayu di kawasan Geylang, yang diduga dibunuh oleh orang Cina. Dalam insiden ini 13 orang tewas dan 106 orang terluka.

Tekanan tekanan inilah yang memaksa pemerintah Singapura untuk memasukkan klausul Melayu dalam konstitusi meskipun arti penyebutan itu bermacam macam. Eugene Tan misalnya menegaskan bahwa penyebutan Melayu dalam konstitusi tak berarti akan menimbulkan perpecahan bagi Singapura, etnis Melayu tidak akan menyerang

Singapura dengan menggunakan kedudukan yang khusus tersebut.

Pemerintah Singapura sebenarnya mempunyai prinsip untuk tidak membawa masalah yang ada di luar Singapura ke dalam negeri. *The problem outside, should not to bring to Singapore*. Meskipun demikian, masalah kerusuhan yang terjadi pada tahun 1964 telah banyak mempengaruhi kebijakan Singapura dalam masalah kebangsaan, di antaranya adalah adanya upaya Pemerintah untuk menjamin keselamatan bagi warga Melayu. Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan AMLA dan MUIS adalah bagian dari upaya tersebut.¹

Analisis seperti ini juga dilontarkan oleh Kerstin Steiner. Menurutnya, dilihat dari perspektif sejarah pemberian status dan perlindungan khusus terhadap kelompok Melayu sangat mendukung dalam menjaga keberlangsungan negara Singapura. *Singapore's historical experience of communal tensions has been interpreted by the ruling political party to mean that safeguarding religious and racial harmony is pivotal for the survival of Singapore* (Steiner: 2015, 1-16).

Sebaliknya pemberian ini harus dilihat sebagai sebuah perisai untuk menghadapi musuh yang lebih besar lagi.

Article 152 should be seen as a shield, rather than a sword, that the minorities can use collectively against the government of the day if it fails to care adequately for them. Any government that fails to honour the spirit

¹ Wawancara dengan Ambassador Musahid Ali, di Nanyang University, 4 Mei 2016.

and substance of Article 152 will suffer the consequences at the ballot box (Tan: 2009).

Musa Alami, Presiden Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) berpendapat bahwa multi-kulturalisme dan sekularisme Singapura tidak berarti anti Tuhan, sebaliknya Singapura bersifat religion friendly (ramah terhadap agama). Eksistensi agama tidak saja di perbolehkan, tetapi justru didukung perkembangannya oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh diberlakukannya AMLA sebagai hukum yang memayungi pemberlakuan hukum Islam. AMLA setidaknya akan melingkupi pengurusan masalah Masjid, Madrasah, Wakaf dan Asatisah.

5.5.2 Implementasi Perlakuan Khusus Etnis Melayu

Di samping garansi dalam bentuk konstitusi, terdapat pula jaminan dalam pelaksanaan kehidupan beragama bagi komunitas Muslim Melayu. Konstitusi 1965 yang menjamin perlindungan atas etnis Melayu diimplementasikan dalam bentuk perundangan yaitu *Administration of Muslim Law Act* (AMLA). Undang undang ini memberikan jaminan bagi pelaksanaan syariat atau hukum hukum Islam bagi para pemeluknya terutama kaum minoritas Melayu dalam kehidupan mereka sehari hari. Undang Undang ini diterbitkan pada 1966.

Keluarnya undang-undang ini menurut Musa, menunjukkan bahwa sekularisme yang dianut Singapura tidak menunjukkan bahwa Singapura adalah anti agama. Sebaliknya, sekularisme yang dianut Singapura ramah terhadap agama (*religious friendly*). Dengan kata lain, Musa

menengarai bahwa Singapura adalah negara yang sekuler tetapi mempunyai jiwa (*secular with soul*)² (Musa: 2016).

Adapun tujuan dari diterbitkannya AMLA ini adalah sebagai berikut:

1. *(MUIS) The Islamic Religious Council of Singapore - The Islamic Religious Council of Singapore is a statutory body to advise the President of Singapore on all matters relating to Islam in Singapore. It also has the role to see that the many and varied interests of Singapore's Muslim community are looked after in accordance with the principles and traditions of Islam as enshrined in the Holy Quran and Sunnah.*
2. *The Syariah Court - The Syariah Court administers Muslim personal law in legal matters governing marriages, divorces, the nullity of marriages and inheritance. The Registry of Muslim Marriages (ROMM) - The ROMM spells out the rules and regulations pertaining to the Muslim marriage registration and divorces where both parties are Muslim. (AMLA: 1966)*

AMLA berlaku efektif sejak 1968, dan sebagai implementasi dari diberlakukannya AMLA adalah pembentukan Majelis Ugama Islam Singapura. Pendirian Majelis sebagai badan organisasi ini adalah implementasi dari Bagian ke dua teks AMLA. Terlepas dari motif politik atau kritik yang menyertainya, lahirnya undang-undang ini

² Wawancara dengan Alami Musa, Pejabat Tinggi Majelis Ugama Islam Singapura, di Rajaratnam School of International Studies, 6 Mei 2016

memang terasa unik. Singapura adalah negara yang didominasi kelompok non Muslim, namun justru mengeluarkan undang undang berkait dengan pelaksanaan hukum-hukum atau syari'at Islam. Sudah barang tentu, Syariat ini ditujukan terhadap umat Islam yang identik dengan Melayu.

Fungsi utama dari MUIS adalah membentuk Presiden dalam penanganan yang terkait dengan Islam. Berikut adalah fungsi dari MUIS sebagaimana termaktub dalam undang-undang AMLA.

- a. to advise the President of Singapore in matters relating to the Muslim religion in Singapore;*
- b. to administer matters relating to the Muslim religion and Muslims in Singapore including any matter relating to the Haj or halal certification;*
- c. to administer all Muslim endowments and funds vested in it under any written law or trust;*
- d. to administer the collection of zakat and fitrah and other charitable contributions for the support and promotion of the Muslim religion or for the benefit of Muslims in accordance with this Act;*
- e. to administer all mosques and Muslim religious schools in Singapore; and*
- f. to carry out such other functions and duties as are conferred upon the Majlis by or under this Act or any other written law (AMLA: 1966).*

Fungsi utama dari Majelis Ulama Islam ini adalah untuk memberikan masukan dan saran kepada Presiden mengenai hubungan pemerintah dengan komunitas Muslim serta penyelenggaraan proses sosial terkait dengan agama Islam. Majelis ini di ketuai oleh seorang Presiden yang dibantu oleh wakil Presiden. Terdapat pula *board* yang lain seperti Sekretaris dan Mufti. Mereka yang berada pada kepengurusan ini mempunyai kapasitas intelektual yang tinggi dilihat dari pendidikannya.

Selain itu, MUIS juga berfungsi membantu penyelenggaraan ritual keislaman. DI antaranya adalah penyelenggaraan dan pengoordinasian khutbah Jum'at, koordinasi sholat iedul fitri termasuk di antaranya adalah pengaturan masalah penyelenggaraan haji. MUIS juga mengatur tentang pelaksanaan Waqaf dan zakat.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan masjid sebagai tempat ibadah. Pemerintah Singapura melalui MUIS telah membangun sejumlah Masjid serta melakukan renovasi terhadap masjid yang memerlukan perbaikan. Saat ini terdapat hampir seratus masjid yang ada di Singapura, baik yang didirikan oleh pemerintah, maupun yang didirikan oleh masyarakat setempat.

Dalam dunia pendidikan, eksistensi dari AMLA memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat Melayu. Pertama, masyarakat Melayu diberikan subsidi pendidikan dan kedua adalah Pemerintah Singapura mengizinkan sekolah sekolah yang berbasis Islam tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan aturan masing-masing. Meskipun demikian, bagi pelajar Muslim di sekolah dasar dan sekolah menengah milik pemerintah, tetap harus mengikuti

peraturan dari pemerintah, misalnya adalah larangan mengenakan atribut Islam di lingkungan sekolah seperti tudung. Saat ini masih terdapat beberapa sekolah berbasis Islam yang cukup populer di Singapura. Di antaranya adalah al Assegaf, aL Maarif, al Junied, al Irsyad dan Wak Tanjung. MUIS akan mensupport keberadaan dan keberlangsungan sekolah sekolah Muslim ini.³

5.5.3 Pergerakan Organisasi Islam

Pemerintahan Lee Kuan Yew dikenal sangat mengontrol aktivitas warga negaranya. Pemberlakuan hukum yang ketat telah memaksa warga negara untuk taat pada hukum. Meskipun terkesan sebagai pemerintah yang otoriter, namun pemerintah Singapura masih memberikan peluang bagi organisasi keagamaan untuk berkembang. Terdapat berbagai gerakan sosial berbasis Islam di Singapura, di antaranya adalah Muhammadiyah, mendaki, Pergas, Pertapis dan lain lain.

Muhammadiyah Singapura atau yang kemudian dikenal sebagai Persatuan Muhammadiyah Singapura (PMS) lahir 25 Mei 1957. Pergerakan ini bermula ketika tiga orang da'i (pendakwah) dari Sumatera yakni Abdul Rahman Haroon, Rijal Abdullah dan Amir Esa melakukan perjalanan dakwah di Singapura. Mereka berdakwah di sekitar Kampong Melayu, Lorong Tai Seng, dan Masjid Paya Goyang. Metode yang mereka gunakan adalah dengan pembacaan kitab al-Qur'an

³ Wawancara dengan Roslan Giri, Mantan pejabat MENDAKI, di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, 6 Mei 2016.

dan Hadits kemudian dikaji. Kita yang sangat mempengaruhi mereka adalah Tasawuf Modern karya HAMKA.

Seperti di Indonesia, Persatuan Muhammadiyah Singapura bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan santunan terhadap kaum dlu'afa. Kini mereka telah mempunyai beberapa sekolah madrasah serta balai layanan terhadap anak muda bermasalah. Fokus dakwah mereka adalah untuk mengaji Islam langsung dari sumbernya, serta mengurangi praktek-praktek ibadah tradisional seperti perayaan Maulid, tahlil, dan talkin. (Aljunied : 2009).

PMS menjadi organisasi yang solid dengan memegang pada beberapa prinsip. Pertama adalah tingginya kesadaran keorganisasian atau semangat kelembagaan (*esprit de corps*) dalam semua lapisan atau tingkatan anggota dan pengurusnya. Kedua adalah keterbukaan dan kesamaan kesempatan untuk menjadi pimpinan di organisasi, termasuk kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan.

Ada tiga tahapan dakwah oleh PMS. Tahap awal antara 1958-1970-an adalah dakwah *bil lisan*, yakni dakwah dengan penyampaian kebenaran wahyu menggunakan lisan melalui pengajian. Tahap kedua, mulai pertengahan 1970-an yakni dakwah *bil ilmi*, dilakukan dengan mengirimkan lebih dari 50 da'i untuk menyampaikan dakwah di kelas kelas khusus dalam setiap kampung (*village*). Dan tahap ketiga dimuali satu dekade kemudian melalui dakwah bil hal yakni dakwah melalui layanan masyarakat (*community services*), dengan mendirikan sekolah dan panti sosial.

Assosiasi Profesional Muslim Association of Moslem Professional (AMP) didirikan pada tahun 10 Oktober 1991 sebagai wadah kaum professional Muslim untuk

pengembangan karier, peningkatan kualitas profesional dan lain2. AMP yang pada Konvensi I nya di hadiri oleh lebih dari 500 orang ini, bergerak dalam bidang pendidikan, human *development*, *social development* dan penelitian.

Berikutnya adalah Jamiyah, nama lain dari Jamiyah adalah *All- Malaya Moslem Missionarry Society*, didirikan oleh Maulana Abdul Aleem Siddiqui di Malaysia pada tahun 1932. Ketika Singapura memisahkan diri dari Malaysia, namanya diubah menjadi *Moslem Missionarry Society* tahun 1970 yang diketuai oleh Mr. Abu Bakar Moidin. Meskipun terpisah, namun masih ada hubungan yang erat dengan All-Malaya Moslem Misionarry Society di Malaysia. Organisasi yang kini mempunyai kantor bertingkat 7 ini mengklaim mempunyai anggota sebanyak 35.000 orang. Jamiyah mempunyai tujuan untuk menyebarkan ajaran Agama Isla, memajukan pendidikan, menyejahterakan masyarakat Islam, mempertahankan Islam dari serangan pihak luar dengan cara cara damai, mempromosikan keharmonisan antar keyakinan dan rantar ras, dan lain lain.

PERGAS adalah Persatuan Ulama Dan Guru-Guru Agama Islam di Singapura yang didirikan pada 1957. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para Ulama dan Guru Agama Islam Singapura. Organisasi ini juga aktif dalam merespon isu-isu sosial yang berkembang, khususnya yang berkenaan dengan Agama Islam, misalnya isu Tudung/Jilbab, Isu Proposal Casino dan Judi, Isu Palestina, Isu Jemaah Islamiah, Isu Homo seksual serta isu karikatur di Denmark yang menghina Islam. Isu isu sensitif tersebut dibahas dalam serangkaian diskusi dan seminar.

Pertapis adalah semacam lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pelayanan pendidikan sosial dan rehabilitasi khususnya komunitas Muslim. Kegiatan sosialnya berupa gathering keluarga, pendidikan untuk anak-anak, bantuan sosial, dan kegiatan sosial yang lain.

5.5.4 Ekonomi berbasis Islam.

Salah satu kebijakan Pemerintah Singapura yang sangat *Islamic Friendly* dalam sebuah negara yang sekuler adalah diberlakukannya *Islamic Finance* atau transaksi ekonomi secara syari'ah Islam. Salah satunya adalah diperbolehkannya beroperasinya bank Syari'ah. Hal ini merupakan sebuah terobosan baru yang mendahului Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akselerasi transaksi ekonomi Muslim sekaligus sebagai upaya untuk mendatangkan investasi khususnya dari dunia negara-negara Timur Tengah.

Parallel to the recognition of Islamic personal law, Islamic finance is then also well recognized in Singapore. Singapore tapped into Islamic banking in July 1991 when Malaysia's largest bank started Islamic banking in Singapore with the introduction of Singapore Unit Trusts Ethical Growth Fund that complies with the principles of the *Shariah*. The bank then, in November 2005, introduced *Shariah*-complaint online savings account and *Shariah*-compliant savings cum checking account. In follow to this initiative, in February 2006, the first *Shariah*-compliant term deposit in Singapore was launched by OCBC Bank. (Triyanta : 2010)

Dengan demikian, Pemerintah Singapura telah memberikan jaminan bagi kelangsungan eksistensi masyarakat Muslim Melayu untuk mengekspresikan kepentingannya sesuai dengan prinsip

agamanya. Berikut adalah kategorisasi kebijakan kebijakan pemerintah Singapura untuk masyarakat Muslim Melayu. Tabel berikut merupakan ringkasan dari berbagai kebijakan tersebut dalam bingkai kategorisasi kebijakan.

Tabel 5.1.
Kategorisasi Pro Muslim Melayu

Kategori	Kebijakan
Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Muslim Melayu sebagai Presiden 2. Pengakuan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional 3. Pengakuan Etnis Melayu sebagai etnis Asli Singapura serta kewajiban negara untuk melindunginya 4. Penetapan Undang undang yang menjamin Muslim dapat menjalankan syari'at Islam (Undang Undang AMLA) 5. Pendirian Majelis Ugama Islam Singapura 6. Keputusan untuk berziarah ke Makan Usman Harun 7. Pemberian ijin penggunaan pangkalan militer Singapura oleh Malaysia 8. Engakuan tanah di sekitar jalur rel Kereta api Melayu sebagai milik Malaysia.
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan berbasis Islam (Madrasah) diperbolehkan 2. Organisasi Sosial Keagamaan dijamin oleh Undang Undang (Societies Act)
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Bank Syariah boleh beroperasi
Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Halal

5.6 Islam sebagai Ancaman bagi Singapura

Berdasarkan berbagai paparan yang telah tersaji di depan, maka dapatlah dimaknai bahwa Islam telah menjadi ancaman tersendiri bagi Singapura. Eksistensi kaum Muslim Melayu di Singapura mempunyai jalinan yang erat dengan komunitas Muslim di negara tetangga yaitu Malaysia dan Indonesia. Eksistensi kaum Muslim Melayu di Singapura juga menciptakan semacam double minority. Artinya, di satu sisi Islam merupakan kaum minoritas di Singapura, sementara pada sisi lain Etnis Cina yang menguasai Singapura merupakan minoritas di Asia tenggara. Keberadaan Etnis Cina di Singapura ini terkepung oleh Islam.

Dalam situasi yang terkepung tersebut tentu saja merupakan posisi yang rentan, apalagi diperburuk oleh hubungan yang cenderung tidak harmonis antara Etnis Cina dengan kelompok Muslim. Pertama, di Malaysia, pemerintah memberikan kedudukan khusus bagi kaum Melayu yang disebut dengan Pribumi. Pribumi sebagai suatu etnis mayoritas dan dianggap sebagai penduduk asli mendapatkan hak-hak istimewa. Nampaknya kebijakan ini juga sangat diharapkan oleh Malaysia untuk diterapkan di Singapura. Tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan UMNO pada akhirnya harus diakomodasi oleh pemimpin Singapura dengan pengakuan eksistensi kaum Melayu dapat konstitusinya.

Kedua, kerusuhan-kerusuhan komunal atau rasial yang dialami oleh Singapura mematrikan citra pada para pemimpin Singapura bahwa menghadapi persoalan etnisitas harus dengan kehati-hatian. Ketidaktepatan *treatment* dalam hal ini

mampu berubah menjadi sebuah bencana kemanusiaan. Kerusuhan rasial yang muncul pasca pemilu menjadi bukti betapa krusialnya persoalan etnis. Oleh karenanya bercermin dari kerusuhan komunal tersebut, maka penting untuk memberikan ruang kepada kaum Muslim Melayu untuk dapat mengartikulasikan kepentingannya. *Singapore's historical experience of communal tensions has been interpreted by the ruling political party to mean that safeguarding religious and racial harmony is pivotal for the survival of Singapore* (Steiner: 2015).

Ketiga, Asia Tenggara berada pada situasi di mana Islam berkembang sedemikian rupa dengan meningkatnya gerakan Islam yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai kebangkitan Islam. Menurutnya, kebangkitan Islam (yang diartikan sebagai *revivalism* dan *resurgency*) mengacu pada pandangan bahwa Islam menjadi kembali penting, Islam dihubungkan pada masa lalunya yang jaya dan gemilang hingga masa lalu tersebut memberikan pengaruh pada pemikiran kaum Muslim sekarang, Islam juga dipandang sebagai sebuah alternatif, dan karena itu dianggap ancaman bagi ideologi lain yang sudah mapan seperti ideologi Barat. (Muzani: 1993, 6).

Menurut Hussin Mutalib, terdapat beberapa ciri dari kebangkitan Islam yaitu pertama, munculnya keinginan yang besar untuk melihat bahwa Islam tidak sekedar mengatur tentang ritual peribadatan, tetapi mengatur seluruh hidup manusia. Kedua, kemunculan keinginan untuk menyatukan ummat Islam di dunia yang nampaknya berbeda tetapi merupakan satu kesatuan. Ketiga, keteguhan hati untuk memperjuangkan keinginan sebelumnya, dan keempat adalah

adanya upaya untuk mendirikan lembaga-lembaga, badan-badan, atau organisasi sebagai kendaraan untuk mewujudkan cita-cita tersebut (Muzani: 1993, 105).

Di antara kemunculan lembaga atau badan-badan tersebut misalnya adalah *International Islamic federation of Student Organization*, *World Assembly of Moslem Youth* (WAMY), *Regional Islamic Council for Southeast Asia and Pacific* (RESEAP), dan *Moslem Student Association*. Pelembagan gerakan ini juga mendandai keteguhan dan harapan besar akan terwujudnya kejayaan Islam (Muzani, 1993, 106).

Hal yang paling berpengaruh pada masalah politik dari kebangkitan ini khususnya untuk Asia Tenggara adalah persoalan integrasi bangsa. Kebangkitan Islam yang mengarah pada islamisasi ini diyakini akan berubah menjadi kelompok yang lebih tertutup dan berbeda dalam beberapa hal misalnya cara berpakaian, kebiasaan makan, kebiasaan dalam bertegur sapa, dan dalam pandangan dunia, sehingga negara semakin sulit untuk mencapai identitas bersama. Oleh karenanya menjadi wajar jika hal ini menimbulkan rasa takut terhadap pemerintah negara-negara Asia Tenggara.

Tahun 1970-an menandai pula gejala tentang kebangkitan Islam khususnya di Asia Tenggara. (Muthalib: 1990). Pada beberapa negara, gerakan Islam mampu merubah dirinya menjadi gerakan politik yang membawa pengaruh signifikan dalam dinamika politik masing-masing negara. Kebangkitan ini dapat saja dipahami sebagai pengaruh dari gerakan politik Islam di Timur Tengah dengan berkembangnya *Ihwanul Muslimin* maupun organisasi lain yang sejenis.

Di Indonesia, gerakan Islam muncul kepermukaan secara menguat dibarengi oleh aktivitasnya yang merambah pada dunia politik. Pertama, terdapat gerakan Islam yang frontal ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, yakni Darul Islam, Tentara nasional Indonesia (DI/TII) pimpinan Karto Suwiryo. Kedua terdapat pula kebangkitan Islam yang merambah polotik secara konstitusional dengan mengikuti kotestasi pemilihan umum. Gerakan ini diwakili oleh Majelis Syura Muslimin Indonesia atau dikenal sebagai Masyumi. Masyumi ini menyatukan gerakan gerakan Islam yang lebih kecil. Kekuatan politik Masyumi sangat diperhitungkan, dan merupakan salah satu kekuatan dari 4 elemen kekuatan politik di Indonesia yakni, Golongan Nasional, Angkatan Bersenjata republic Indonesia, Komunis dan Islam yang diwakili oleh Masyumi. Di samping itu, masih tumbuh pula gerakan gerakan sosial seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), maupun Persatuan Islam (PERSIS) (Muzani: 1993, 27)

Kelompok Pattani di Thailand Selatan juga merupakan kekuatan yang sedang tumbuh. Keberadaannya sebagai kekuatan Islam mampu memberika perlawanan terhadap pemerintah di Bangkok. Dari sekian banyak Perdana Menteri Thailand yang pernah berkuasa, tak satupun yang mampu meberikan penyelesaian secara tuntang tentang kasus Islam di Selatan ini.

Senada dengan Thailand, Bangsa Moro di Mindanau Selatan juga merupakan simbul kebangkitan Islam di Filipina. Ia mampu hadir ke pentas politik dengan membawa jargon Islam. Berbagai perundingan dan kebijakann telah dilakukan untuk meredam kekuatan Islam ini, tetapi hingga saat ini mereka masih belum dapat ditumpas secara tuntas.

Malaysia merupakan negara dengan kekuatan Islam terbesar di Asia Tenggara, seiring dengan peran besar mereka dalam politik. Pengaruh muncul dalam partai Islam *Pan-Malayan Islamic Party* (PAS). Ciri Islamnya sering diimbangi oleh UMNO dalam konteks menampilkan ciri Islamnya meski simbolis. (Yousif: 2004) Namun para pemimpin Malaysia tidak segan untuk menampilkan ciri keislaman dalam kenegaraan.

Stigma bahwa Islam merupakan ancaman sepertinya telah benar benar melekat pada pemikiran para pemimpin Singapura termasuk dalam persepsi Lee Kuan Yew. Pengalaman sejarah tentang bagaimana perlakuan para pemimpin Malaysia pada Singapura yang sengaja memisahkannya dari Malaysia sangat membekas pada pemikirannya. Pemikiran tersebut misalnya terungkap dalam buku otobiografinya. *“I think we were progressing very nicely until the surge of Islam came and if you ask me for my observations, the other communities have easier integrations – friends, inter-marriage and so on, Indians with Chinese, Chinese with Indians, than Muslims. That’s the result of surge from the Arab states.I would to say today, we can integrate all religions and races except Islam,....I think Muslims socialy do not cause any trouble, bu they are distinct and separate (Bolt: 2011)*

Stigma negatif Islam tersebut nampaknya terbawa hingga kepada para penggati Lee Kuan Yew. Para pemimpin generasi pasca Lee Kuan Yew sepertinya tidak jauh persepsinya tentang Islam, sebagai suatu ancaman yang harus dikelola agar tidak menjadi gejolak.

Persepsi lain tentang ancaman serius Islam ini juga dilontarkan oleh Pillai. Baginya, masalah rasial di Singapura telah menjadi semacam luka yang parah dalam hubungan antara Singapura dan Malaysia. Rasialisme dan Xenophobia akan menjadi ganjalan bagi hubungan kedua negara di masa yang akan datang. *Relations between Malaysia and Singapore follow a pattern of mutual suspicion spiced with racial and cultural xenophobia. Realties can not improve until each country can exorcise the political and cultural ghosts of other that haunt their present.* (Pillai: 1992)

Timeline peristiwa penting di Singapore

